

## **Pengembangan Pengelolaan Pariwisata oleh Badan Usaha Milik Desa di Jambi**

**Maratun Saadah<sup>1\*</sup>, M. Norma Sampoerno<sup>2</sup>, Zuhri Triansyah<sup>3</sup> and Fransisko Chaniago<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; [ip.maratun@uinjambi.ac.id](mailto:ip.maratun@uinjambi.ac.id)

<sup>2</sup>UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; [ip.norman@uinjambi.ac.id](mailto:ip.norman@uinjambi.ac.id)

<sup>3</sup>UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; [zuhri.triansyah@fdi.or.id](mailto:zuhri.triansyah@fdi.or.id)

<sup>4</sup>UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; [ip.fransisko@uinjambi.ac.id](mailto:ip.fransisko@uinjambi.ac.id)

\*Correspondence: [ip.maratun@uinjambi.ac.id](mailto:ip.maratun@uinjambi.ac.id)

Received: 17 Maret 2021; Accepted: 19 April 2021; Published: 30 April 2021

### **Abstract:**

Village-owned Enterprises (BUMDes) are an important instrument in realizing dignified village autonomy. The existence of BUMDes is expected to be one of the main pillars of increasing village income so that it can provide higher quality public services. The management of local tourism potential is one of the prospective business alternatives for Village-Owned Enterprises. The involvement of BUMDes in tourism management is not only for economic purposes. BUMDes role in tourism is also mean to allow the preservation and development of local wisdom values in tourism. This article analyzes the pattern of local character tourism development by BUMDes in three villages. Those are Mumpun Baru Village, Tanjung Lanjut Village, and Pendung Talang Genting Village in Jambi Province. The articles are written based on the research results conducted qualitatively in the Muaro Jambi, Kerinci, and Merangin areas with a purposive sampling method. The analysis shows that several things characterize the development of tourism through BUMDes, namely, tourism products, innovation or novelty in the development of tourism products, the preservation of local wisdom values, the institutional aspects of BUMDes, the contribution of tourism to the community's economy. In addition, managing tourism with BUMDes is key in supporting the achievement of sustainable tourism which is the global agenda of countries around the world.

**Keywords:** *Village-owned enterprises; local wisdom; tourism; community empowerment*

### **Abstrak:**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan otonomi desa yang bermartabat. Keberadaan BUMDes diharapkan bisa menjadi salah satu penopang utama peningkatan pendapatan desa sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Pengelolaan potensi wisata lokal menjadi salah satu alternatif usaha potensial yang bisa dilakukan oleh BUMDes. Keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan pariwisata tidak hanya bertujuan ekonomis, namun sekaligus diharapkan mampu melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal dalam kepariwisataan. Artikel ini menganalisis pola pengembangan pariwisata berkarakter lokal oleh BUMDes di tiga desa yakni Mumpun Baru, Tanjung Lanjut, dan Pendung Talang Genting di Provinsi Jambi. Artikel ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara kualitatif di daerah Muaro Jambi, Kerinci dan Merangin dengan metode purposive sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi ciri dalam pengembangan pariwisata melalui BUMDes yaitu; produk pariwisata, inovasi atau kebaruan dalam pengembangan produk pariwisata, terpeliharanya nilai-nilai kearifan lokal, aspek kelembagaan BUMDes, kontribusi pariwisata terhadap perekonomian masyarakat. Selain itu, pengelolaan

pariwisata dengan BUMDes menjadi kunci dalam mendukung tercapainya pariwisata berkelanjutan yang merupakan agenda global negara di seluruh dunia.

**Kata Kunci:** *Badan Usaha Milik Desa; BUMDes; kearifan lokal; pariwisata; pemberdayaan masyarakat*

---

## 1. Pendahuluan

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis pengembangan pariwisata melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Jambi. Melalui Undang-Undang Desa tahun 2014, Desa sebagai institusi paling kecil dalam sebuah negara telah diberikan otonomi luas untuk merencanakan pembangunannya sendiri. UU ini memberikan kesempatan bagi desa untuk berdaya, melalui potensi yang dimiliki dengan keterbatasan untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Paradigma pembangunan yang sebelumnya hanya meletakkan desa sebagai obyek pembangunan, kini berubah menjadi subjek utama pembangunan.

Gemuruh pembangunan desa mulai terasa sejak saat itu, desa yang dulu identik dengan terbelakang, miskin dan kurang menguntungkan (Rahayu, 2018) kini Desa telah menjadi pusat dari pembangunan negara Indonesia, hal ini menjadi bukti bahwa kebijakan ini efektif (SULASTRI, 2016; Wirahadi, 2020). Keriuhan pembangunan desa menyentuh seluruh aspek mulai dari sosial budaya (Andayani, Martono, & Muhamad, 2017; Aryani, Sunarti, & Darmawan, 2017; Gunawan, Suryadi, & Malihah, 2015), ekonomi (Sofianto, 2017; Prasetyo, 2016; Rani, 2018; Alkadafi, 2014) dan infrastruktur (SULASTRI, 2016).

Kebijakan UU Desa diikuti dengan pemberian Dana Desa sebagai keberpihakan Pemerintah Pusat dalam bentuk desentralisasi fiskal, sebagai harapan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sidik, 2015). Dana Desa diarahkan sebagai cara untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa melalui usaha produktif dan dilakukan melalui BUMDes. Konsep lembaga ekonomi seperti BUMDes efektif untuk membangun sektor pariwisata berbasis komunitas.

Dalam upaya membangun sektor pariwisata berbasis komunitas yang bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa sekaligus menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, terdapat berbagai asas-asas fundamental sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu *Pertama*, mengenai asas rekognisi yakni asas pengakuan terhadap hak asal usul. Secara terminologi, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 menjelaskan bahwa hak asal usul merupakan yang merupakan peninggalan yang masih ada dan ide desa atau inisiasi penduduk desa disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat.

*Kedua*, asas subsidiaritas dapat dipahami sebagai sebuah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 menjelaskan bahwasanya kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Salah satu aktifitas yang banyak dikelola oleh BUMDes di Indonesia adalah bidang pariwisata. Dalam pendekatan pengembangan pariwisata dikenal banyak konsep diantaranya yang merupakan agenda global yaitu Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal mengarahkan pembangunan Desa untuk memenuhi agenda besar SDGs dengan salah satu indikatornya adalah Pariwisata Berkelanjutan. Selain itu, pengembangan pariwisata membutuhkan partisipasi aktif dari warga setempat. Konsep ini dikenal dengan *Community Based Tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis komunitas.

Selain itu, pengembangan pariwisata dengan partisipasi aktif dari masyarakat dapat dipahami bahwa partisipasi publik (*Public Participation*) diartikan sebagai proses aktif dimana masyarakat dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidupnya (Ólafsdóttir, 2021), juga untuk meningkatkan kesadaran untuk berkomunitas (Suansri, Yeejawhaw, & Richards, 2013). Oleh karena itu, pengembangan pariwisata desa berbasis BUMDes sudah tepat untuk dilakukan, didukung dengan adanya dasar hukum yang memperkuat kehadiran BUMDes.

Pertumbuhan pariwisata di Provinsi Jambi meningkat dibuktikan dengan tajamnya peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (wisnu) ke objek wisata di Provinsi Jambi yaitu sebesar 86% pada tahun 2018 saja. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan objek wisata, pada 2019 jumlah objek wisata mencapai 453 spot naik sekitar 50% dibanding data tahun 2012 (Saragih, 2019).

Kabupaten Kerinci misalnya, popularitas objek pariwisata yang dikelola BUMDes seperti Taman Pertiwi bahkan menjadi ancaman bagi objek wisata milik Pemerintah Daerah yang lokasinya berdekatan. Objek Wisata Taman Pertiwi pada libur Idul Fitri 2019 lalu mampu menghasilkan omset rata-rata sebesar 25 juta Rupiah per hari. Akan tetapi pada saat hari biasa ataupun libur akhir pekan omset pendapatan sebesar 10 juta Rupiah.

Fenomena destinasi wisata BUMDes lainnya yaitu Kawasan Wisata Danau Tangkas di Muaro Jambi yang dikelola oleh BUMDes Tanjung Lanjut Mandiri. Spot wisata ini menjadi primadona dan ikon wisata baru di Kabupaten Muaro Jambi. Meskipun lokasi Danau Tangkas cukup jauh dan akses jalan yang tidak terlalu baik namun Kawasan ini tetap ramai pengunjung. Kawasan yang dulu hanya dianggap sebagai rawa tidak berguna, berubah menjadi penyokong perekonomian utama bagi masyarakat desa.

Kecenderungan demikian juga terjadi pada Agrowisata Mambun Baru, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin. Objek wisata tersebut menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat dan menghidupkan perekonomian. Sekali lagi, pariwisata berbasis komunitas yang dikembangkan oleh BUMDes terbukti memiliki kontribusi yang optimal. Fakta ini tentunya menjadi menarik untuk dikaji, destinasi wisata yang dikelola oleh BUMDes lebih menarik untuk dikunjungi dibanding dengan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan karakteristik khusus yang mereka miliki.

Pengembangan pariwisata sejenis ini membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan yang dikelola oleh korporasi kebanyakan. Karakteristik BUMDes sebagai sebuah Lembaga memberikan pengaruh signifikan terhadap suksesnya aktifitas perekonomian yang dilakukan (Diartho, 2017) (Saleh, Apriono, Prasodjo, & Ariwan 2018). Pengelolaan pariwisata oleh BUMDes juga memiliki tantangan tersendiri sebagai upaya menjaga nilai – nilai kearifan lokal sekaligus berkontribusi bagi perekonomian (Meilinda & Fiolanda, 2019; Fitriyani 2019 Sebagai sebuah destinasi wisata, nilai jual utama tentunya adalah produk wisata, sehingga BUMDes yang mengelola pariwisata juga perlu untuk mempertimbangkan aspek tersebut, diiringi dengan terus berinovasi untuk mempertahankan keberlangsungan usaha (Nursetiawan, 2018;Kurniasih & Wijaya, 2017;Wibisono, 2020).

Kajian terkait pola pengembangan pariwisata berbasis BUMDes perlu untuk dilakukan untuk memetakan hal-hal yang perlu untuk dilakukan dalam upaya pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan serta tercapai amanat dalam UU tentang Desa merupakan salah satu indikator dalam agenda pembangunan berkelanjutan SDGs.

Penelitian mengenai pariwisata berbasis BUMDes tentu telah banyak dilakukan (Sumiasih, 2018; Abdur Rozaki & Siti Rohaya, 2019 Novandi & Adi, 2019) terkait dengan strategi (Meirinawati, 2019; Budiani, Sri Rahayu. Wahdaningrum et al., 2018; Latuconsina, Syaikat, & Siregar, 2019). Bagaimana prinsip dan kriteria (WWF-Indonesia, 2009), kapasitas komunitasnya (Nurcahyono, 2017), model dalam kolaborasi (Rozikin, Wismanu, & Muttaqin, 2019; Tresiana & Duadji, 2017) serta implementasinya di berbagai daerah (Pakpahan, 2018) (Nurhidayati, 2012; Lestari, 2009) Temuan dari penelitian tersebut cukup mendalam, namun belum menyentuh pada aspek yang memperlihatkan pola-pola pengembangan pariwisata berbasis BUMDes yang ternyata membutuhkan pendekatan tersendiri. Berdasarkan temuan-temuan awal inilah, penulis mencoba untuk memetakan parameter yang tepat dalam upaya pengembangan pariwisata berbasis BUMDes.

Dalam penelitian ini, paling tidak terdapat beberapa hal yang menjadi ciri dalam pengembangan pariwisata melalui BUMDes yaitu; produk pariwisata, inovasi atau kebaruan dalam pengembangan produk pariwisata, terpeliharanya nilai-nilai kearifan lokal, aspek kelembagaan BUMDes, kontribusi pariwisata terhadap perekonomian masyarakat. Selain itu, pengelolaan pariwisata dengan BUMDes menjadi kunci dalam mendukung tercapainya pariwisata berkelanjutan yang merupakan agenda global negara di seluruh dunia.

Artikel penelitian ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara kualitatif di daerah Muaro Jambi, Tebo dan Kerinci. Pariwisata ini dikelola oleh tiga BUMDes yakni BUMDes Tanjung Lanjut yang mengelola wisata Danau Tangkas, BUMDes Mambun Baru yang mengelola Agrowisata dan BUMDes Pendung Talang Genting yang mengelola Taman Pertiwi di Kabupaten Kerinci. Metode yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan melalui teknik *Purposive Sampling*. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari pengurus BUMDes, kepala desa dan masyarakat sekitar.

## 2. Hasil Penelitian

### 2.1. Produk Wisata

Dalam kajian literatur wisata, dikenal istilah produk wisata yang menggambarkan keseluruhan kondisi dari sebuah objek wisata. Ada beberapa pendapat terkait kategori dari produk wisata, ahli pariwisata klasik seperti Gooddall secara sederhana mendefinisikan produk pariwisata sebagai ketersediaan baik sumber yang berwujud maupun yang tidak berwujud (Goodall, 1993). Konsep yang lebih klasik lagi dari pada Produk Pariwisata adalah yang dikemukakan oleh Medlik dan Middleton (Medlik & Middleton, 1973) yang mendefinisikan produk pariwisata menjadi 3 komponen yaitu atraksi (daya tarik), fasilitas dan aksesibilitas. Meskipun klasik, tiga komponen tersebut masih relevan untuk dijadikan indikator, tentunya dengan didukung pendapat kontemporer dari masing – masing indikator.

#### 2.1.1. Atraksi: Alam menyediakan, Manusia membangun

Terdapat 2 bentuk atraksi yaitu alam dan buatan, dari 3 objek penelitian keseluruhannya mengkolaborasikan keindahan alam dengan atraksi buatan. Alam tidak hanya menyediakan keindahan yang bersifat menenangkan, menjadi tujuan pengunjung untuk melepas lelah pekerjaan sebagai salah satu tujuan orang dalam berwisata. Alam tersedia secara gratis, menjadi potensi wisata yang paling mudah dan murah untuk dikembangkan, sehingga kemudian menjadi ciri dari atraksi wisata yang dibangun oleh BUMDes. BUMDes Tajam melihat Danau Tangkas, hutan mangrove dan pulau – pulau kecil yang ada di Desa Tanjung Lanjut sebagai sebuah atraksi alam yang potensial. Atraksi buatan seperti spot camping, akses jalan dan infrastruktur lainnya dibangun untuk mendukung atraksi yang disediakan oleh Alam. Suasana saat matahari terbit dan tenggelam di lokasi ini dimaksimalkan dengan disediakannya anjungan dan kantin terapung.

Begitu pula dengan keindahan alam Kerinci yang dimaksimalkan dengan baik oleh warga desa Pendung Talang Genting. Objek wisata Taman Pertiwi dibangun pada kolam buatan dengan memanfaatkan latar belakang penampakan Gunung Kerinci, waduk, hutan pohon pinus dan sejuknya udara alam. Sedangkan atraksi buatan seperti kolam ikan, pondok-pondok tempat beristirahat, beragam permainan air, spot berfoto, arena *flying fox*, rumah pohon dan sepeda tali. Meskipun sederhana, atraksi ini cukup diminati oleh pengunjung. Sedangkan atraksi pada Agrowisata Mampun Baru yang disediakan oleh alam tentu alam itu sendiri, bentang Merangin yang sejuk sangat mendukung untuk kegiatan perkebunan. Selebihnya atraksi buatan yang disediakan adalah kolam renang dan beragam tanaman buah, dengan mendukung konsep kebugaran di masa pandemi, panitia berharap kedua atraksi ini dapat menjadi alternatif untuk masyarakat tetap sehat. Dari ketiga objek wisata tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiganya memiliki tidak hanya atraksi buatan namun juga didukung dengan atraksi alam yang

mendukung. Artinya, BUMDes setempat dapat melihat peluang dan memanfaatkannya untuk mengembangkan objek wisata yang tepat.

### 2.1.2. Fasilitas

Dalam penelitian ini, konsep tentang fasilitas meliputi fasilitas yang memadai seperti toilet yang bersih, tempat ibadah, dan tempat sampah di setiap sudut. Dari ketiga objek wisata tersebut, kebutuhan fasilitas mendasar seperti toilet, kawasan parkir, mushalla, kantin dan tempat sampah sudah tersedia. Kenyamanan pengunjung semakin meningkat karena fasilitas tersebut berada dalam kondisi baik. Toilet bersih, mushalla yang cukup luas, kantin dan tempat beristirahat lain yang beragam serta tempat pembuangan sampah yang cukup banyak. Kawasan parkir juga tersedia cukup luas, bahkan sudah melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan ruang parkir. Pengunjung dapat memarkirkan kendaraannya dengan tenang di halaman rumah warga. Selain itu, pada objek wisata Danau Tangkas juga sudah tersedia tempat pertemuan, karena konsep wisatanya adalah menginap, maka tempat ini cocok untuk kegiatan pertemuan atau agenda organisasi lainnya. Masyarakat melalui BUMDes sudah memahami betul kebutuhan akan fasilitas mendasar, kenyamanan pengunjung menjadi tolak ukur penting dalam pengembangan fasilitas. Hal ini menjadikan pariwisata berbasis BUMDes selalu menarik minat pengunjung untuk datang kembali.

### 2.1.3. Aksesibilitas; *Jauh di mata, namun dekat di hati*

Aksesibilitas dapat diartikan sebagai keterjangkauan suatu objek wisata untuk dicapai (Khotimah & Wilopo, 2017). Dalam pengembangan pariwisata, tidak dapat dipungkiri bahwa lokasi menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan. Lokasi objek wisata yang dekat dengan kota, akses jalan yang mudah dan posisinya di antara objek wisata lainnya idealnya menjadi faktor penting dalam pengembangan pariwisata. Namun ternyata, hal tersebut tidak selamanya berlaku untuk setiap keadaan. Wisata danau tangkas misalnya, terletak cukup jauh dari pusat kota yaitu 40 km dari Kota Jambi, dan 15 km dari Kota Sengeti. Di sekitar Danau Tangkas juga tidak terdapat objek wisata lain, akses jalan cukup baik meskipun tidak sempurna. Terdapat jalan yang cukup rusak sehingga sulit diakses oleh kendaraan tertentu. Sedangkan untuk wisata Taman Pertiwi, lokasi tidak jauh dari Kota Sungai Penuh. Taman Pertiwi berjarak sekitar 16 km dari pusat kota Sungai Penuh, juga terdapat banyak objek wisata lain di sekitar Taman Pertiwi karena letaknya yang dekat dengan Danau Kerinci. Hal ini mendukung jumlah kunjungan yang terus meningkat, wisatawan dapat berkunjung ke lebih dari satu objek wisata dalam satu keberangkatan. Hal ini menunjukkan bahwa faktanya lokasi yang jauh dan terpencil tidak selalu menjadi penentu utama dalam pengembangan pariwisata. Kultur masyarakat Jambi yang terbiasa menempuh jarak jauh dalam berpergian dapat menjadi salah satu faktor penentu.

### 2.2. Inovasi

Inovasi dapat diartikan sebagai unsur kebaruan, sebagai sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya atau perbaikan dari sesuatu yang sudah pernah ada. Dalam pengembangan pariwisata, inovasi adalah salah satu faktor penting. Agrowisata Buah di Tabir Barat merupakan pengembangan yang unik dari sektor pariwisata, belum banyak pariwisata yang dikembangkan dengan pendekatan agrowisata di Provinsi Jambi. Tanah dan bentang alam Merangin yang subur sangat tepat untuk dijadikan lahan perkebunan, sehingga inovasi tersebut tepat untuk dilakukan.

Inovasi juga dilakukan oleh BUMDes Tajam dalam upaya pengembangan wisata danau tangkas. Saat wisata tersebut baru dibangun, konsep glamping belum banyak dikenal. Inovasi ini menarik minat khususnya bagi kalangan generasi muda yang menjadi pasar strategis bagi jenis wisata ini. Jika hanya mengandalkan atraksi alam danau saja, nilai jual objek wisata ini tidak terlalu tinggi.

Demikian pula dengan Taman Pertiwi, di sekitar lokasi ini banyak tempat wisata lain seperti Danau Kerinci dan lokasi lain yang sudah mapan. Namun, tempat wisata dengan banyak spot berfoto pada saat

itu belum banyak dikembangkan. Sehingga, tidak heran juga objek wisata ini banyak diminati masyarakat. Inovasi merupakan faktor penting yang tidak dapat dilepaskan dari pengembangan pariwisata, nilai kebaruan selalu menjadi faktor pendukung yang menarik wisatawan untuk datang.

### 2.3. Kearifan Lokal

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai sebuah modal sosial yang merupakan ide masyarakat, dikembangkan sebagai upaya menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat itu sendiri (Hidayati, 2017). Kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari dapat berbentuk aturan-aturan adat, kegiatan gotong royong (Anwar, Syahrani, Maulana, Putryanda, & Wajidi, 2018), dan juga tentunya prinsip moral yang berasal dari pemahaman warga lokal (Abbas, Handy, Shaleh, & Hadi, 2020). Fungsinya secara umum adalah sebagai petunjuk bagi upaya pemecahan masalah dalam kehidupan masyarakat setempat (Anamofa, 2010). Dalam pengembangan pariwisata berbasis BUMDes di Provinsi Jambi, nilai-nilai kearifan lokal seperti semangat gotong royong menjadi modal utama. Gotong royong baik dalam perumusan ide hingga pengelolaan dan pengembangan dilakukan oleh seluruh masyarakat desa. BUMDes Tajam pada saat itu belum dibentuk, atas inisiasi dari kepala desa dan 8 (delapan) orang warga, mereka mengkonsepkan objek wisata dengan potensi Danau Tangkas yang ada. Demikian pula dengan Taman Pertiwi dan Agrowisata Buah Mampun Baru. Pada awal pendirian atas ide dari perangkat desa dan dilakukan secara sukarela bergotong royong oleh masyarakat desa. Setelah konsep terpetakan, maka pemerintah desa membentuk lembaga untuk menjalankan sektor bisnisnya.

Kearifan lokal juga tergambar dari peraturan-peraturan yang ada di objek wisata. Menjaga keseimbangan dengan alam menjadi rambu dalam pengelolaan pariwisata, seperti pada Agrowisata Mampun Baru dengan konsep perkebunannya. Danau Tangkas memiliki peraturan yang ketat terkait dengan norma bagi pengunjung yang menginap. Tamu yang berbeda jenis kelamin tanpa hubungan keluarga tidak diperkenankan untuk berada pada satu tenda yang sama. Tindakan asusila dilarang keras dan dipantau secara tegas oleh pengelola.

Kearifan lokal menjadi modal utama dalam pengembangan pariwisata berbasis BUMDes. Masyarakat desa masih memegang teguh nilai-nilai modal sosial. Semangat gotong royong menjadikan pariwisata berbasis BUMDes berkembang baik pada masa awal pembentukan. Nilai-nilai seperti kesopanan dan moralitas menjaga pariwisata tetap berjalan sesuai dengan aturan dan keselarasan alam.

### 2.4. Kelembagaan BUMDes

Dalam upaya menjalankan bisnis pariwisata dan menggunakan Dana Desa, masyarakat perlu untuk membentuk kelembagaan berupa Badan Usaha Milik Desa atau yang dikenal dengan BUMDes. Sebagai suatu keharusan, BUMDes pada akhirnya berdiri secara masif. Suatu lembaga dapat dikatakan memiliki performa yang baik jika paling tidak memiliki tujuan yang jelas, telah resmi secara hukum dan memiliki fungsi untuk kesejahteraan masyarakat. BUMDes adalah lembaga berbadan hukum dan membawahi segala jenis unit usaha milik desa. Berdasarkan UU Desa maka BUMDes memiliki payung hukum yang jelas dan dapat menjadi aktor ekonomi untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa secara berkelompok.

BUMDes yang mengelola pariwisata tersebut dibentuk atas prakarsa masyarakat yang terlebih dahulu memiliki tekad untuk mengembangkan potensi desa berupa pariwisata. Sehingga sesuai dengan apa yang ditulis oleh Sutoro Eko tentang salah satu faktor penentu dalam kesuksesan BUMDes, yaitu prakarsa mandiri dari masyarakat desa (Fitrianto, 2016). Sehingga mereka memiliki tujuan yang jelas, yakni untuk menjalankan usaha desa. Baik di objek wisata Taman Pertiwi, agrowisata Mampun Baru maupun Danau Tangkas, usaha telah ada terlebih dahulu, baru kemudian lembaga dibentuk untuk menopang jalannya usaha tersebut.

## 2.5. Kontribusi Bagi Perekonomian Masyarakat

Dalam banyak literatur, kontribusi pariwisata selalu dihubungkan pada perekonomian nasional atau pada level terkecil seperti Daerah. Ukuran kontribusinya dilihat dari seberapa besar pemasukan daerah yang bersumber dari retribusi pariwisata tersebut. Pada perjalanannya, pariwisata dengan skala kecil mulai banyak dikembangkan oleh masyarakat, baik pribadi, berkelompok maupun dengan lembaga BUMDes. Tentunya, pariwisata sejenis ini memiliki karakteristik kontribusi secara ekonomi yang berbeda. Perbedaan yang paling mencolok adalah kontribusi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pariwisata yang dikembangkan oleh BUMDes cenderung berskala kecil, namun pengelolaan keuangannya dipegang langsung oleh desa, sehingga kontribusi terhadap perekonomian masyarakat desa akan lebih maksimal.

Hal inilah yang menjadikan pariwisata berbasis BUMDes unggul dari segi kontribusi perekonomian bagi masyarakat. Paling tidak, terdapat 4 (empat) indikator suatu pariwisata dikatakan berkontribusi bagi perekonomian warga, yaitu; pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, kepemilikan aset oleh masyarakat, pembangunan wilayah desa pada umumnya.

Secara langsung, kegiatan pariwisata dari tiga lokasi memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan kepada masyarakat bagi mereka yang menyediakan jasa maupun usaha di sekitar tempat wisata. Selain retribusi, pengunjung tentu saja membelanjakan uang untuk keperluan seperti konsumsi. Kantin terapan di Danau Tangkas dikelola secara pribadi oleh masyarakat, pendapatan mereka cukup besar terlebih jika hari libur saat pengunjung ramai menginap. Selain itu, di danau tangkas juga terdapat anak – anak kecil yang mengisi waktu luang dengan menjual kayu bakar untuk keperluan camping pengunjung. Di Taman Pertiwi, masyarakat banyak menjadi penjual makanan dan minuman. Masyarakat diberikan aturan tertentu untuk menjual dengan harga normal seperti pada umumnya, dengan harapan kesan yang diberikan masyarakat terhadap Taman Pertiwi tidak buruk yaitu menaikkan harga di luar harga pasaran.

Secara tidak langsung, BUMDes memberikan kontribusi berupa pemasukan bagi kas desa. Kas inilah yang digunakan oleh desa untuk melakukan program kerja desa. Perbaikan fasilitas umum seperti jalan desa, gapura dan pagar di desa Tanjung Lanjut dibiayai oleh laba BUMDes. Kegiatan sosial seperti lomba – lomba di hari besar juga memungkinkan untuk dilakukan dengan adanya dana dari aktifitas BUMDes pariwisata Danau Tangkas. Bahkan, di Taman Pertiwi pada musim libur Lebaran tahun 2020 lalu omset tempat wisata ini mencapai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hari.

Dengan aktifitas wisata yang ramai ini, tentunya membutuhkan bantuan tenaga kerja yang merupakan warga desa setempat. Keunggulan pariwisata yang dikembangkan oleh BUMDes adalah dapat menjamin seluruh tenaga kerja merupakan warga lokal. Penyerapan tenaga kerja di Taman Pertiwi pernah mencapai hingga 70 orang selama periode libur lebaran. Meskipun status pekerjaannya bukan karyawan tetap, namun pendapatan upah mereka cukup besar yakni Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang. Agrowisata Mampun Baru menyerap tenaga kerja lokal selain untuk penjaga parkir, pengelola kebun, hingga penjaga kolam renang. Hasil penjualan buah – buahan menambah kas desa, meskipun tidak terlalu besar namun cukup untuk mengangkat pendapatan desa. Tidak ada lagi desa dengan status desa tertinggal.

Berbeda dengan pariwisata yang dikembangkan oleh korporasi maupun pemerintah, kepemilikan aset didominasi oleh BUMDes. Masyarakat secara pribadi tidak memiliki aset pribadi di tempat wisata. Namun paling tidak, pada pariwisata berbasis BUMDes dengan desa sebagai institusi paling kecil dalam negara menjadikan masyarakat desa sebagai pemilik kegiatan usaha tersebut. Manfaat dan dampak terasa lebih besar dibanding dengan yang dikelola oleh pihak lainnya.

## 2.6. Prinsip Pariwisata Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia sebagai negara anggota PBB berkomitmen penuh untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Salah satu agenda dalam SDGs adalah pariwisata berkelanjutan. Konsep pariwisata berkelanjutan dapat dipahami sebagai konsep yang mengusung pelestarian ekosistem, kesejahteraan masyarakat serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Nguyen, Young, Johnson, & Wearing, 2019). Pariwisata memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, kehidupan sosial dan budaya masyarakat di hampir seluruh dunia (Pan et al., 2018), sehingga pariwisata dapat menjadi faktor penting dalam upaya pelestarian lingkungan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat di lain sisi.

Ciri utama dari pariwisata yang dikembangkan oleh BUMDes adalah identik dengan nilai – nilai yang terkandung dari prinsip pariwisata berkelanjutan. Tidak hanya Agrowisata Mampun Baru dengan konsep perkebunan yang tentu alami, namun Taman Pertiwi dan Danau Tangkas juga menjamin kelestarian ekosistem di sekitarnya. Atraksi alam masih menjadi daya tarik utama dari ketiga pariwisata tersebut. Sehingga, kondisi ekosistem masih sangat dijaga. Danau dengan hamparan hutan mangrove di danau tangkas tidak boleh untuk dirusak, pengunjung hanya dapat menyaksikan rindangan pepohonan melalui perahu saja. Kebersihan pulau untuk menginap juga sangat dijaga, pada saat akhir pekan pengunjung ramai berkemah di pulau, masyarakat umum datang beramai – ramai membersihkan pulau secara bergotong royong. Keindahan alam dan kesejukan udara juga menjadi modal utama pariwisata Taman Pertiwi. Kelangsungan ekosistem dan terjaganya lingkungan dengan baik menjadi rambu utama dalam pengelolaan Taman Pertiwi.

Pengelolaan pariwisata berbasis BUMDes tidak dapat dilepaskan dari partisipasi dan pelibatan masyarakat. Seperti telah disebutkan di atas bahwa nilai seperti gotong royong menjadi faktor utama dalam pengembangan awal pariwisata oleh BUMDes. Partisipasi masyarakat dari ketiga pariwisata ini dimulai sejak penyusunan rencana awal, masyarakat terlibat aktif dalam musyawarah untuk pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pengembangan tempat wisata. Rasa kepemilikan yang tinggi oleh masyarakat pada pariwisata yang dikembangkan oleh BUMDes menjamin tercapainya tujuan pariwisata berkelanjutan.

## 3. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis pola pengembangan pariwisata berbasis BUMDes di Provinsi Jambi, dapat disimpulkan bahwa diperlukan beberapa hal untuk memaksimalkan pariwisata yang dilakukan oleh BUMDes. *Pertama*, produk pariwisata. Sebagai bagian penting dari pariwisata, produk wisata adalah barang yang akan dijual kepada masyarakat. Produk wisata terdiri dari atraksi berupa atraksi alam seperti bentang alam, danau, sungai, dan atraksi buatan seperti spot berfoto, saung, dan wahana permainan. Selain atraksi, produk wisata juga terdiri dari fasilitas dan aksesibilitas. Fasilitas yang lengkap seperti adanya toilet bersih, tempat ibadah, kantin dan tempat sampah menjadi nilai lebih yang memudahkan pengunjung dalam beraktifitas. Namun, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lokasi yang jauh dan berjauhan dengan objek wisata lain menjadikan alasan masyarakat enggan berkunjung. Selain itu aspek kebaruan atau inovasi penting untuk dilakukan agar ada nilai tambah objek wisata dibanding dengan tempat lain. Hal unik lainnya dari pengembangan pariwisata oleh BUMDes adalah terjaganya nilai – nilai kearifan lokal yang merupakan modal sosial dalam masyarakat. Nilai tersebut menjadi pendukung dalam pengembangan pariwisata yang dikelola oleh komunitas, nilai seperti gotong royong dan norma sosial adalah bagian diantaranya. Selain itu, kelembagaan BUMDes menjadi pendukung penting bagi jalannya pariwisata secara maksimal. Kelembagaan yang diinisiasi oleh prakarsa masyarakat, memiliki tujuan yang jelas serta berorientasi pada fungsi kesejahteraan masyarakat adalah ciri dari kelembagaan yang baik untuk pengembangan pariwisata. Kesemuanya terdapat dalam BUMDes yang mengelola pariwisata. selain itu, dalam pengembangan pariwisata berbasis BUMDes memberikan kontribusi yang signifikan bagi

perekonomian masyarakat desa, baik secara langsung seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun tidak langsung seperti terbangunnya fasilitas publik secara umum di desa. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, desa tentu harus berkontribusi terhadap rencana pembangunan berkelanjutan, termasuk pada indikator pariwisata berkelanjutan. Tentu saja, pengembangan desa wisata berbasis BUMDes di Provinsi Jambi memenuhi unsur – unsur keberlanjutan yang telah disepakati oleh seluruh dunia.

Penelitian ini menemukan faktor-faktor yang menjadi kelebihan apabila dikelola oleh BUMDes antara lain terkait perekrutan karyawan. Perekrutan karyawan BUMDes dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Kemudian, dalam sistem pengelolaan keuangan dilakukan oleh BUMDes langsung dengan menerapkan prinsip-prinsip standar akuntansi, akuntabilitas, konsistensi, *viability* (pengeluaran sejalan dengan pemasukan), dan integritas. BUMDes juga menetapkan standar operasional dan prosedur terkait pengelolaan dengan cara menetapkan standar operasional dan prosedur atau SOP yang wajib dipatuhi seluruh karyawannya. Mulai dari bagaimana menjaga keamanan serta kenyamanan pengunjung hingga petunjuk kerja untuk meminimalisir potensi kebocoran pendapatan. Adapun kelemahan apabila sistem pengelolaan yang dilakukan oleh perseorangan ataupun Pemda. Kelemahannya terkait tentang kesehatan dan kebersihan yang masih kurang diperhatikan pada tempat pariwisata, selain itu juga keberlanjutan lingkungan lokasi pariwisata belum diterapkan. Kesehatan dan higienis di beberapa tempat yang dikunjungi, dan keberlanjutan lingkungan

Penelitian ini masih belum sempurna, sebagai bagian dari kajian lintas sektor, maka banyak ruang yang dapat masih dikembangkan oleh peneliti lainnya. Salah satunya adalah faktor – faktor penentu keberhasilan dan kegagalan pariwisata yang dikelola BUMDes, agar memperkuat argument pola pengembangan model apa yang paling tepat untuk dilakukan oleh BUMDes dalam mengembangkan potensi desa untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

### **Penghargaan**

Terima kasih kepada pengurus BUMDes Tanjung Lanjut Mandiri, BUMDes Taman Pertiwi dan BUMDes Mampun Baru.

### **Konflik Kepentingan**

Penulis menyatakan bahwa hasil penelitian ini bebas dari konflik kepentingan dengan pihak manapun.

### **Referensi**

- Abbas, E. W., Handy, M. R. N., Shaleh, R. M., & Hadi, N. T. F. W. (2020). Ecotourism of Martapura River Banjarmasin as a Learning Resources on Social Studies. *The Innovation of Social Studies Journal*. <https://doi.org/10.20527/iis.v1i2.2024>
- Abdur Rozaki, & Siti Rohaya. (2019). Memberdayakan Desa Melalui Pariwisata Berbasis BUMDES. *Engagement : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.29062/engagement.v3i1.46>
- Alkadafi, M. (2014). PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA MENUJU ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015. *Jurnal EL-RIYASAH*. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.656>
- Anamofa, J. N. (2010). *Kearifan Lokal Guna Pemecahan Masalah*. Yoyakarta. Retrieved from [https://www.researchgate.net/profile/Jusuf-Anamofa/publication/326457987\\_Kearifan\\_Lokal\\_Guna\\_Pemecahan\\_Masalah/links/5b4e97e3a6fdcc8dae27ad45/Kearifan-Lokal-Guna-Pemecahan-Masalah.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Jusuf-Anamofa/publication/326457987_Kearifan_Lokal_Guna_Pemecahan_Masalah/links/5b4e97e3a6fdcc8dae27ad45/Kearifan-Lokal-Guna-Pemecahan-Masalah.pdf)
- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui

- Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Anwar, M. A., Syahrani, G., Maulana, A. Z., Putryanda, Y., & Wajidi. (2018). Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*.
- Aryani, S., Sunarti, S., & Darmawan, A. (2017). ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN PARIWISATA PADA ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT (Studi Kasus pada Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*.
- Budiani, Sri Rahayu. Wahdaningrum, W. dkk., Budiani, S. R., Wahdaningrum, W., Yosky, D., Kensari, E., Pratama, H. S., ... Kusmiati, Y. (2018). Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah. *Majalah Geografi Indonesia*.
- Diartio, H. C. (2017). Strategi Terhadap Pengembangan Kelembagaan BUMDESA di Kabupaten Jember. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i2.1801>
- Fitrianto, H. (2016). Revitalisasi Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Desa di Jawa Timur Institutional Revitalization of Bumdes In .... *Jejaring Administrasi Publik*.
- Goodall, B. (1993). Industrial heritage and tourism. *Built Environment*. <https://doi.org/10.1057/9781137293565.0021>
- Gunawan, H., Suryadi, K., & Malihah, E. (2015). ANALISIS PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA CIHIDEUNG SEBAGAI DESA WISATA. *SOSIETAS*. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v5i2.1524>
- Hidayati, D. (2017). MEMUDARNYA NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. <https://doi.org/10.14203/jki.v11i1.36>
- Khotimah, K., & Wilopo, W. (2017). STRATEGI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA BUDAYA (Studi Kasus pada Kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*.
- Kurniasih, D., & Wijaya, S. S. (2017). KEGAGALAN BISNIS PEMERINTAH DESA: Studi Tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n2.p66-72>
- Medlik, S., & Middleton, V. T. C. (1973). Product formulation in tourism. *Tourism and Marketing*.
- Meirinawati, M. B. P. &. (2019). STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA PUNCAK TAPAN ANDONGSARI OLEH BUMDES NGANDONG JAYA MAKMUR DI DESA NGANDONG KECAMATAN GRABAGAN. *Jurnal Mahasiswa Unesa*.
- Nguyen, T. Q. T., Young, T., Johnson, P., & Wearing, S. (2019). Conceptualising networks in sustainable tourism development. *Tourism Management Perspectives*. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100575>
- Nurchayono, O. H. (2017). Kapasitas Komunitas Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Pedesaan. *Jurnal Pendidikan, Sosiologi, Dan Antropologi*.
- Nurhidayati, S. E. (2012). Pengembangan Agrowisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas di Kota Batu,

Jawa Timur. *Text*.

- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Ólafsdóttir, R. (2021). The role of public participation for determining sustainability indicators for arctic tourism. *Sustainability (Switzerland)*. <https://doi.org/10.3390/su13010295>
- Pakpahan, R. (2018). IMPLEMENTASI PRINSIP PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS DI DESA WISATA NGLINGGO YOGYAKARTA. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2018.v05.i01.p07>
- Pan, S. Y., Gao, M., Kim, H., Shah, K. J., Pei, S. L., & Chiang, P. C. (2018). Advances and challenges in sustainable tourism toward a green economy. *Science of the Total Environment*. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.134>
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan Bumdes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*.
- Rahayu, D. (2018). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*. <https://doi.org/10.15294/edaj.v6i2.22207>
- Rani, S. (2018). Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Rozikin, M., Wismanu, R. E., & Muttaqin, A. (2019). MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA BERBASIS INDIGENOUS TOURISM. *MEDIA BINA ILMIAH*. <https://doi.org/10.33758/mbi.v14i4.345>
- Saragih, R. (2019). Geliat Pariwisata Jambi.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan*. <https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.23-32>
- SULASTRI, N. (2016). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA LAKAPODO KECAMATAN WATOPUTE KABUPATEN MUNA. *IOSR Journal of Economics and Finance*.
- Sumiasih, K. (2018). Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p10>
- Wirahadi. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Keuangan Desa / Nagari Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. *Akuntansi Dan Governance Andalas*.
- WWF-Indonesia, D. K. dan P. dan. (2009). Prinsip dan Kriteria EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT. *Ekowisata*.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).